

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketimpangan pembangunan daerah dapat dikaitkan dengan beberapa aspek yaitu keadaan geografi, ekonomi, sosial, demografi, budaya dan politik. Munculnya ketimpangan pembangunan akan berimplikasi terhadap penataan pembangunan. Salah satu pengaruh dari ketimpangan pembangunan adalah muncul perbedaan dalam pencapaian kualitas hidup di beberapa daerah terutama perbedaan yang terjadi antara kota dan desa. Selanjutnya secara tidak langsung akan memberi dampak pada pengembangan sumber daya manusia. Ini sering menjadi persolan dalam pembangunan. Fenomena perbedaan kondisi spasial suatu daerah menyebabkan perbedaan dalam tingkat kemajuan ataupun kemunduran antar daerah. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi daerah, taraf ekonomi masyarakat, taraf kesehatan dan pendidikan.¹

Kebijakan strategis pembangunan menempatkan sumber daya manusia sebagai perspektif pembangunan. Hal ini sesuai dengan strategi pembangunan nasional dengan menetapkan pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia.² Kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, khususnya daerah tertinggal. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur melalui

¹ Wiko Saputra dan Rahmah Hida Nurriszka, *"An Analysis of Quality of Life In West Sumatera Province: Using the Z-Score Method with Susenas 2008"*, Departemen Kesehatan Masyarakat, Pasca Sarjana FKM UI, hlm 1

² BPS 2009, *"Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008"*, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kabupaten Gayo Lues.

pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada tahun 2012, indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal hanya mencapai 68.04 persen, jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 73.29 persen. Rendahnya indeks pembangunan manusia di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan produktivitas masyarakat.³

Pada dasarnya pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (penduduk). Dalam hal ini telah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (penduduk) adalah dengan pembangunan ekonomi, yaitu serangkaian kegiatan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yang dilihat dari kualitas fisik dan non fisik penduduk. Adapun tiga indikator tersebut yaitu : 1) Indikator kesehatan, 2) Tingkat pendidikan dan 3) Indikator ekonomi.⁴

Sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan suatu bangsa, karena manusia adalah faktor produksi yang bersifat aktif

³ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Rencana Strategis (RENSTRA) Direktorat Jendral Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019", hlm. 15

⁴ Septiana. M. Sanggelorang, et all, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara", Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 15 No. 02-Edisi Juli 2015, h.2

mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, politik, ekonomi dan melaksanakan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus dilakukan. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *Multiplier Effect* terhadap pembangunan suatu negara, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Secara umum tingkat pendidikan dan kesehatan dapat mewakili kualitas tenaga kerja karena dengan pendidikan, seseorang akan bertambah keterampilannya, dan dengan kesehatan seseorang akan lebih kuat dan jernih pemikirannya dalam bekerja.⁵

Modal manusia telah diakui secara global sebagai salah satu faktor utama yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan suatu bangsa. Menurut Folloni dan Vittadini, modal manusia mengacu pada kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam.⁶

Lanjouw dalam Ginting, menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada

⁵ Notoadmojo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan Dan Prilaku Kesehatan*. Rineka Cipta: Jakarta

⁶ Oluwatobi, Stephen O & Ogunrinola, I Oluranti. 2011. *Government Expenditure On Human Capital Development: Implications For Economic Growth in Nigeria*. Journal Of Sustainable Development. Vol. 4

gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan.⁷

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spiritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan.⁸

Berdasarkan data Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (2014), di Sumbar masih terdapat tiga daerah penyandang status tertinggal. Selain Pasaman Barat dan Solok-Selatan, satu lagi adalah Kabupaten Mentawai. Penetapan status daerah tertinggal, antara lain terkait erat dengan tingkat kemiskinan rakyat dan minimnya infrastruktur daerah. Penetapan kriteria daerah tertinggal tak lepas dari perekonomian masyarakat, sumber daya manusia (SDM), kemampuan keuangan, aksesibilitas dan karakteristik daerah.⁹

Dengan demikian sekurangnya ada sektor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sehubungan dengan upaya memperluas kesempatan penduduknya

⁷ Ginting, C.K.S, Lubis I dan Mahalli K. (2008), *"Pembangunan Manusia di Indonesia"*, Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Vol. 04, No. 01, Wahana Hijau

⁸ Michael. P Todaro dan Smith, S. SC. 2006. *"Pembangunan Ekonomi Edisi Sembilan Jilid 1"*. Jakarta: Erlangga

⁹ Harian Haluan, *"Mendorong Tiga Daerah Tertinggal"*. Rabu, 27 Januari 2018, jam 18:44:03 WIB

untuk mencapai hidup layak yaitu pendidikan. Dalam hal ini bisa terwujud melalui alokasi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, dengan meningkatnya alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tersebut maka akan meningkat pula produktivitas penduduk.¹⁰

Berdasarkan Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya Pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor Pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.¹¹

Mulyadi menyatakan bahwa peningkatan kualitas manusia dapat dipenuhi dengan berbagai kebijakan, yaitu pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang, pembangunan kesehatan menitik beratkan dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan, untuk penduduk miskin peningkatannya dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepaskan diri dari kemiskinan.¹²

Peningkatan indeks pembangunan manusia tidak hanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu

¹⁰ A. Widodo., Waridin, dan K. J. M. 2011. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Tengah". Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, 1(1), 1-11

¹¹ Lihat Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pasal 49 "Tentang Sistem Pendidikan Nasional"

¹² S. Mulyadi. 2003. "Pengantar Mikro dan Makro Edisi 4". Jakarta: Mitra Wacana M.

bagi indeks pembangunan manusia sehingga pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan.¹³

Adanya pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Kondisi pemerataan pembangunan yang tercapai akan mendorong akselerasi indeks pembangunan manusia.¹⁴

Berikut ini dapat kita lihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016 dalam tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan
Tahun 2007-2016

No	Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (%)
1	2007	67.54
2	2008	68.06
3	2009	68.67
4	*2010	*64.51
5	*2011	*64.81
6	*2012	*65.12
7	*2013	*65.86
8	*2014	*66.29
9	*2015	*67.09
10	*2016	*67.47

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat*

¹³ Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur. 2008. Statistik Daerah Propinsi Jawa Timur

¹⁴ Muhammad Nur. Wicaksono, 2014. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah Terhadap Peningkatan PDRB Propinsi Di Indonesia Tahun 2008-2012. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya

**Metode Baru*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan selama tahun 2007-2016. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan mengalami perubahan Fluktuatif (Naik-Turun) setiap tahunnya. Di mana indeks pembangunan manusia pada tahun 2007-2009 mengalami kenaikan setiap tahunnya dari 67.54 % sampai 68.67 %. Sedangkan pada tahun 2009-2010 indeks pembangunan manusia mengalami penurunan setiap tahunnya dari 68.67 % menjadi 64.51 %. Kemudian pada tahun 2010-2016 indeks pembangunan manusia mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 64.51 % sampai 67.47 %.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang umum digunakan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan *trickle down effect* yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional

digunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sedangkan untuk tingkat daerah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil.¹⁵

Untuk melihat perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016 dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok-Selatan
Tahun 2007-2016

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2007	6.08
2	2008	6.12
3	2009	4.55
4	*2010	*4.81
5	*2011	*5.58
6	*2012	*5.44
7	*2013	*6.13
8	*2014	*5.90
9	*2015	*5.35
10	*2016	*5.11

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat*
**Metode Baru*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok-Selatan selama tahun 2007-2016. Dimana Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok-Selatan mengalami perubahan Fluktuatif (Naik-Turun) setiap tahunnya. Pada tahun 2007-2008 pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 6.08% pada tahun 2007 menjadi 6.12% pada tahun 2008. kemudian pada tahun 2008-2009

¹⁵ Nur, Baeti. 2013. "Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011". *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol. 2 (3) (2013)

Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Solok Selatan mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2008 sebesar 6.12% menurun pada tahun 2009 sebesar 4.55%. Kemudian pada tahun 2009-2013 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2009 sebesar 4.55%, tahun 2010 sebesar 4.81%, tahun 2011 sebesar 5.58%, tahun 2012 sebesar 6.04% dan pada tahun 2013 sebesar 6.13%. dan pada tahun 2013-2016 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 sebesar 6.13%, tahun 2014 sebesar 5.90%, tahun 2015 sebesar 5.35% dan tahun 2016 sebesar 5.11%.

Besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat dilihat dari seberapa besar alokasi anggaran pemerintah (Publik) yang dikeluarkan untuk meningkatkan pembangunan manusia. Semakin besar alokasi anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk meningkatkan komponen-komponen pembangunan manusia, maka akan semakin meningkat pula pembangunan manusia pada suatu negara atau daerah tersebut, dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah mempunyai keterkaitan terhadap peningkatan IPM suatu negara atau daerah.¹⁶

Untuk melihat perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016 dapat dilihat pada tabel 1.3 di bawah ini:

¹⁶ Al Asy Ari Adnan hakim dan Raditya Sukmana, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di 16 Negara Organisasi Konferensi Islam (OKI)", Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, h.71

Tabel 1.3
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Solok-Selatan
Tahun 2007-2016

No	Tahun	Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (Juta)
1	2007	69.947,59
2	2008	93.638,86
3	2009	108.900,73
4	2010	101.824,07
5	2011	139.793,38
6	2012	152.483,38
7	2013	179.393,99
8	2014	199.097,22
9	2015	217.765,18
10	2016	237.817,36

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat*

Berdasarkan tabel 1.3 di atas, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bagaimana perkembangan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016. Dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami perubahan Fluktuatif (Naik-Turun) setiap tahunnya. pada tahun 2007-2009, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Kabupaten Solok-Selatan mengalami kenaikan pada tahun 2007 sebesar Rp.69.947.590.000, tahun 2008 sebesar Rp.93.638.860.000, dan pada tahun 2009 sebesar Rp.108.900.730.000. Kemudian pada tahun 2009-2010, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami penurunan, dimana pada tahun 2009 sebesar Rp.108.900.730.000 menjadi Rp.101.824.070.000 pada tahun 2010. Dan pada tahun 2010-2016, pengeluaran pemerintah sektor

pendidikan kembali mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2010 sebesar Rp.101.824.070.000, tahun 2011 sebesar Rp.139.793.380.000, tahun 2012 sebesar Rp.152.483.380.000, tahun 2013 sebesar Rp.179.393.990.000, tahun 2014 sebesar Rp.199.097.220.000, tahun 2015 sebesar Rp.217.765.180.000 dan tahun 2016 sebesar Rp.237.837.360.000.

Untuk mewujudkan tercapainya kedua faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia tersebut dilakukan upaya konkrit dan berkesinambungan, karena pembangunan manusia merupakan sebuah bentuk investasi dari modal manusia yang ikut berperan dalam pembangunan nasional maupun daerah. Karena pembangunan suatu negara/daerah tersebut dapat dilihat dari tingkat pembangunan manusia di suatu Negara/daerah tersebut, oleh sebab itu di butuhkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah mengenai peningkatan pembangunan manusia tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang telah di uraikan maka penulis tertarik meneliti dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan ?
2. Berapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan ?
3. Berapa besar pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok-Selatan ?

C. Batasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Solok-Selatan tahun 2007-2016.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan.
2. Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan.

3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Solok-Selatan.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis sendiri, sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE).
2. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi makro, ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam, serta sebagai panduan dan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji masalah sejenis.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan informasi sehingga pemerintah sebagai regulator dapat melakukan perencanaan dan pengembangan serta memutuskan arah kebijakan tersebut secara lebih baik lagi.
4. Bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka, referensi dan informasi tambahan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan dapat memberikan gambaran singkat mengenai penelitian ini, maka penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari V (Lima) Bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, bab ini membahas beberapa unsur yaitu menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Kerangka Teori, Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa konsep tentang teori Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan.
- BAB III : Metodologi Penelitian, berisi tentang jenis penelitian, sumber data, defenisi operasional, metode pengumpulan data dan analisis pengolahan data.
- BAB IV : Hasil dan Pembahasan, Pada bab ini sebagai hasil dari penelitian berisi tentang penyajian data dan analisis pengolahan data.
- BAB V : Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan saran.



UIN IMAM BONJOL
PADANG